

Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Mempersiapkan Masyarakat Industri

Paturungi Parawansa

Abstrak: Masyarakat industri yang segera dihadapi oleh bangsa Indonesia memerlukan pendidikan sebagai alat transformasi. Pendidikan perlu ditingkatkan mutunya. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat. Strategi peningkatan mutu pendidikan yang dapat dijadikan alternatif antara lain adalah penguatan dan pemberdayaan lembaga pendidikan, pembenahan kurikulum dan GBPP, peningkatan kualifikasi dan kualitas tenaga kependidikan, pengubahan mental masyarakat ke arah masyarakat industri, serta pengimplementasian berbagai kebijakan dan aturan secara konsisten dan tidak berstandar ganda.

Kata-kata kunci: masyarakat industri, strategi, mutu pendidikan.

Peranan pendidikan bagi suatu bangsa sangatlah penting. Ahli-ahli ekonomi berpendapat bahwa laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat sebagian besar ditentukan oleh tingkat pendidikan rakyatnya. Para ahli ilmu politik dan pemerintahan mengakui bahwa kemajuan pembangunan suatu bangsa sangat berkaitan dengan tingkat kecerdasan bangsa itu. Ahli-ahli ilmu militer tidak pernah sangsi bahwa kemenangan akhir suatu perang hanya dapat diraih oleh tersedianya kualitas sumberdaya manusia yang terdapat di belakang mesin perang itu. Demikian pula para pemimpin keagamaan berdakwah kepada umatnya bahwa ilmu yang diperoleh melalui jalur-jalur pendidikan dapat meningkatkan derajat seseorang. Sedemikian pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan, negara-negara di dunia memilih pendidikan sebagai bagian dari strategi pembangunannya dan sarana untuk mencapai cita-cita pembangunannya.

Paturungi Parawansa adalah Guru Besar dan mantan Rektor IKIP Ujung Pandang, kini menjadi anggota tetap The International Council on Education for Teaching (ICET) yang berpusat di New York.

Peranan pendidikan bagi suatu bangsa juga dirasakan dengan penuh kesadaran oleh para pendiri negara (*founding fathers*) Indonesia. Ketika mereka bersidang mempersiapkan rancangan undang-undang dasar negara Indonesia yang akan didirikannya, mereka dengan sadar memasukkan pendidikan sebagai unsur penting dalam konstitusi tersebut. Hal itu terlihat dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945. Mereka melihat bahwa untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, rakyat harus dicerdaskan dan Pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan terhadap semua warga negara tanpa kecuali berdasarkan satu sistem pendidikan nasional.

Memasuki usia 50 tahun Indonesia, telah terbukti bahwa pendidikan memainkan peranan sangat penting dalam usaha mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Apa yang telah dicapai dalam berbagai sektor kehidupan bangsa selama kurun waktu 50 tahun adalah terlaksananya pencerdasan kehidupan bangsa sebagai salah satu cita-cita kemerdekaan. Hasil-hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan itu bahkan mendapat pengakuan dunia berupa penganugerahan Medali *Avisena* oleh Sekjen PBB kepada Presiden Soeharto.

PENDIDIKAN SEBAGAI PROSES

Pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu proses, satu kegiatan yang terus menerus bergerak untuk mencapai satu tujuan masa depan. Kaufman (1972) merumuskan pendidikan sebagai suatu proses mempersiapkan atau membekali para pembelajar dengan sedikit-tidaknya pengetahuan, keterampilan dan sikap agar mereka dapat hidup dan bekerja dalam masyarakat apabila mereka secara formal telah lulus dari lembaga pendidikan. Bagi Kaufman, proses mempersiapkan anak didik dengan sejumlah keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kelak bisa masuk ke dalam masyarakat itu bersifat teratur dan terencana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah satu kekuatan sosial yang ikut dibentuk dan membentuk masa depan manusia.

Di dalam masyarakat tradisional, proses pendidikan berfungsi sebagai proses pewarisan atau transmisi kebudayaan. Di dalam masyarakat dengan identitas komunikasi yang semakin meningkat, proses pendidikan menjadi proses yang mengantisipasi masa yang akan datang, masa depan generasi muda, masa depan bangsa dan masa depan umat manusia. Proses pendidikan harus berbicara mengenai *the future tense* (Parawansa dan Rahamma, 1989).

Pengalaman menunjukkan bahwa banyak bangsa yang kurang berhasil dalam pembangunan masa depannya karena mereka gagal dalam perancangan proses pendidikannya. Sebaliknya banyak negara dan bangsa yang menjadi kuat dan disegani karena berhasil merancang pendidikannya sebagai satu proses. Jepang, misalnya, dalam tempo hanya sekitar 100 tahun telah berhasil menantang perang dengan negara Amerika Serikat yang telah menggedornya pada pertengahan abad ke-19. Negara-negara di sekitar lingkaran Pasifik (*Pasific rimes*) disebut sebagai macan-macan Asia karena keberhasilan pembangunan ekonominya, antara lain karena faktor keberhasilan pendidikannya (Djojonegoro, 1995).

Di Indonesia, pengalaman selama satu PJP sampai sekarang mengajarkan besarnya peranan pendidikan sebagai proses dalam pembangunan nasional. Sebagaimana dikemukakan dalam laporan Bank Dunia berjudul *The East Asian Miracle*, pendidikan terbukti mampu mendorong pembangunan di delapan negara Asia termasuk Indonesia yang dinilai telah menciptakan keajaiban dalam pembangunannya selama kurun waktu 30 tahun (1960—1990). Pendidikan yang mampu menunjang pembangunan itu adalah pendidikan merata dari segi akses peserta didik, bermutu, dan relevan dari segi hasil, dan efisien dari segi penyelenggara (Djojonegoro, 1995).

ABAD XXI, ERA INDUSTRIALISASI

Saat ini adalah penghujung abad XX. Kurang lima tahun lagi abad XX akan berlalu. Sebaliknya abad XXI telah berada di muka pintu. Tanda-tanda kehidupan abad yang akan datang telah banyak yang kita rasakan dan saksikan sekarang. Beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan berbagai kajian akademis dan tulisan-tulisan dari para cendekiawan tentang abad yang akan datang. Sebagian besar mereka sependapat bahwa peralihan dari abad XX ke abad XXI akan membawa perubahan struktural masyarakat, dari masyarakat agraris yang tradisional ke masyarakat industri yang modern. Sedemikian jauh perubahan itu terjadi sehingga tidak saja dirasakan oleh masyarakat kita, melainkan di masyarakat belahan dunia lain, terutama di Asia Tenggara. Perubahan mental itu perlu diantisipasi sehingga tidak menyebabkan keterkejutan. Pendidikan dapat berperan untuk memberikan urunan.

Sumitro Djojohadikusumo sepuluh tahun yang lampau telah menyampaikan pikiran-pikirannya tentang perdagangan dan industri Indonesia menjelang abad XXI. Dalam ceramahnya di depan simposium 35 tahun FE-UI tanggal 10 September 1985 di Jakarta, dia menyatakan bahwa apabila pada akhir dasawarsa 1980 kita masih berada dalam tahap "sedang dalam proses industrialisasi",

dan menjelang pertengahan dasawarsa 1990 Indonesia sudah merupakan "negara semi industri", maka pada tahap perkembangannya telah dapat menuju ke arah tahap industri (*industrial country*). Di dalamnya, sektor industri sekurang-kurangnya menyumbang 30% terhadap produk nasional. Menurut dia, industrialisasi dan kebijaksanaan di bidang industri merupakan bagian intrinsik dalam kebijaksanaan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber alam dan sumberdaya produksi lainnya. Artinya, industrialisasi dan kebijaksanaan di bidang industri ini diarahkan untuk kesejahteraan sebagian besar penduduk secara bersinambung dan lestari dengan membatasi dan menanggulangi pencemaran, pemborosan, dan pengrusakan terhadap lingkungan (Djojohadikusumo, 1987).

Sumitro Djojohadikusumo juga mengemukakan berbagai kendala yang dihadapi oleh industri dan perdagangan Indonesia (Djojohadikusumo, 1987). Tampaknya 10 tahun kemudian kendala-kendala itu belum dapat diatasi secara tuntas dan masih tetap menghantui perekonomian Indonesia. Kendala-kendala itu adalah: (1) keadaan sumberdaya produksi yang tersedia tetapi dengan kelangkaan modal dan keterbatasan pada sumberdaya manusia dari sudut keterampilan teknis, keahlian profesional, kemampuan pengelolaan (*managerial capability*), tingkat ilmu dan teknologi; (2) penggunaan sumberdaya produksi diutamakan pada produksi primer sehingga menimbulkan pengangguran secara terselubung yang menekan produktivitas tenaga manusia; (3) kesenjangan dalam pola pembagian kekayaan dan pendapatan antar golongan masyarakat, antar daerah, antara lingkungan kota dan daerah pedesaan; (4) kerangka institusional dalam tata susunan masyarakat dan perilaku dalam pergaulan hidup yang kurang memadai tuntutan modernisasi.

Apa yang diramalkan oleh Sumitro Djojohadikusumo pada 1985 tentang perdagangan dan industri kita itu terlihat dalam kebijaksanaan nasional yang tertuang dalam GBHN 1993. Seperti termaktub dalam GBHN tersebut, pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bersaing, dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan pasar luar negeri dengan selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan industri kita itu, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa dimantapkan dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki bangsa Indonesia, memanfaatkan keunggulan komparatif dan menciptakan keunggulan kompetitif dengan selalu memperhatikan dampaknya bagi stabilitas ekonomi (BP7 Pusat, 1993). Dari sini dapat dikatakan bahwa industrialisasi, yang awalnya di tahun 80-an, prosesnya di tahun 90-an, dan puncaknya pada awal abad XXI,

akan sangat peduli dan bergantung kepada tiga hal, yakni: (1) bagaimana mengembangkan sumberdaya manusia; (2) bagaimana mengelola, memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya alam; dan (3) bagaimana memperkuat struktur ekonomi yang kuat dan kompetitif daya saingnya.

Tampaknya negara-negara tetangga kita di ASEAN pun kini sangat sibuk membuat antisipasi-antisipasi abad XXI itu. Di Malaysia, misalnya, dengan jargon, "Vision 2020", tidak kurang dari Perdana Menteri Mahathir Muhammad sendiri menulis berbagai artikel. Dalam bukunya, *The Way Forward*, diterbitkan oleh *Center for Economic Research and Service, Malaysian Business Council*, Kuala Lumpur, 1991, Mahathir Muhammad menulis tentang sosok *vision 2020* itu dan strategi-strategi menghadapinya. Mengutip pendapat Mahathir, Othman Alhabshi, dalam artikelnya di jurnal IKIM dengan tajuk, *Mental Change to Cope 2020* menulis antara lain bahwa *Vision 2020* membayangkan Malaysia sebagai negara industri maju dengan penduduk yang bersatu dan mandiri, yang dirasuki oleh nilai-nilai moral dan etika yang kuat, hidup dalam suatu masyarakat yang demokratis, liberal dan bertenggangrasa, secara ekonomi adil dan merata, maju dan makmur, dan dalam sistem perekonomian yang kompetitif, dinamis, kukuh dan liat (Alhabshi, 1993).

Meskipun masih bersifat ramalan, yang dikemukakan tersebut di atas didasarkan pada sejumlah perhitungan, asumsi, dan indikator yang dapat disaksikan sekarang. Masyarakat kita sekarang sudah terlihat lebih intelek, lebih menghendaki sikap keterbukaan dan demokratisasi serta peduli kepada kepentingan orang per orang. Ekonomi kita sekarang lebih mengarah kepada efisiensi, produktivitas, dinamis, dan kompetitif. Masyarakat kita, di samping makin mendunia, juga makin sering mempertanyakan jati dirinya.

STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Berangkat dari pemikiran bahwa strategi adalah *skill in managing any affair*, dan/atau *the use of a trick in order to succeed in some purpose* (Hornby, 1957), perlu dipahami sosok yang akan kita tuju serta kecenderungan-kecenderungan dan kendala-kendala yang masih dihadapi masyarakat yang akan kita tuju. Hal itu telah jelas seperti terlihat di depan. Yang perlu diberi kejelasan adalah kecenderungan-kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang terutama dilihat dari perspektif pendidikan.

Apa yang dikemukakan oleh Wardiman Djojonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Silaknas ICMI di Jakarta tanggal 6—8 Januari 1995 tentang kecenderungan-kecenderungan masyarakat kita ditinjau dari perspektif

pengembangan sumberdaya manusia, sangatlah menarik. Dia antara lain menyatakan bahwa: (1) pendidikan semakin dituntut untuk tampil sebagai kunci dalam pengembangan sumberdaya manusia, yaitu manusia yang memiliki kemampuan, kepribadian, dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan; (2) dalam dunia kerja, orientasi kepada kemampuan nyata (*what one can do*) yang dapat ditampilkan oleh lulusan pendidikan akan semakin kuat; (3) sebagai dampak globalisasi, mutu pendidikan suatu negara tidak hanya akan diukur berdasarkan kriteria dalam negara itu, melainkan dibandingkan dengan negara-negara lain; (4) aspirasi dan harapan masyarakat kepada dunia pendidikan akan semakin meningkat, yaitu pendidikan yang lebih bermutu, relevan, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); (5) bersamaan dengan tuntutan yang semakin kuat akan mutu, akan semakin kuat pula tuntutan akan perlunya pendidikan yang lebih relevan, lebih merata, lebih adil, lebih manusiawi, dengan menjangkau semua orang (Djojonegoro, 1995).

Wardiman Djojonegoro juga mengemukakan bahwa untuk berhasilnya proses industrialisasi diperlukan empat agenda utama, yaitu: (1) proses pengembangan (termasuk di dalamnya transfer) dan penerapan teknologi; (2) kesiapan sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan dan kepakaran dalam mengembangkan dan penerapan iptek tersebut dalam proses industrialisasi; (3) kesiapan masyarakat dalam mengembangkan (transformasi) dan memasuki budaya industrial, yakni yang berkaitan dengan wawasan, sikap, mentalitas dan tata-nilai baru yang diperlukan dalam suatu masyarakat teknologis, masyarakat industrial; dan (4) kesiapan masyarakat dalam beraksi secara proporsional (menangkal dan menyeimbangkan) tata-nilai ikatan proses industrialisasi yang tidak sejalan dengan jatidiri bangsa (Djojonegoro, 1995).

Bertitik tolak dari gambaran sosok masyarakat industri yang akan kita tuju, kecenderungan, dan kendala yang dihadapi yang terlihat dalam masyarakat, agaknya kita harus mempertimbangkan satu strategi yang tepat agar sektor pendidikan mampu mendukung arah industrialisasi dan mempersiapkan masyarakatnya. Boleh jadi apa yang dikemukakan di bawah ini ada yang merupakan ulangan dari pendapat orang lain. Namun diharapkan pikiran ini dapat menyempurnakan gagasan yang boleh jadi berasal dari sejumlah orang.

Strategi itu harus disusun secara menyeluruh, terarah, dan terpadu sehingga bersifat sinergetik untuk mencapai tujuan. Bagaimana memperkuat dan memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan yang ada? Bagaimana membenahi kurikulum dan GBPP-nya? Bagaimana meningkatkan kualitas dan kualifikasi tenaga-tenaga pendidikannya? Bagaimana mengubah mental masyarakat sehingga

ga siap berkiprah sebagai salah satu pilar pendidikan? Bagaimana membuat kebijaksanaan implementasi yang konsisten dan tidak berstandar ganda?

Pertama, kelembagaan pendidikan perlu diperkuat dan diberdayakan. Penguatan dan pemberdayaan itu dilakukan dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi. Efisiensi dan efektivitas harus menjadi acuan dalam pengelolaannya. Pendirian lembaga-lembaga pendidikan baru baik negeri maupun swasta harus bersifat selektif. Agaknya proses akreditasi yang ketat terhadap lembaga-lembaga pendidikan makin perlu diberlakukan. Ujian-ujian negara terhadap mahasiswa PTS boleh jadi sudah perlu dihapus. Persaingan keterserapan lulusan-lulusan itu akan sangat ditentukan oleh standar mutu lembaga-lembaga pendidikan penghasilnya. Jika lembaga-lembaga pendidikan itu kuat dan berdaya maka lulusannya akan memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang kuat menghadapi instansi/lembaga penggunaanya.

Kedua, pembenahan kurikulum dan GBPP yang sesuai dengan tuntutan di lapangan. Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerapkan Kurikulum 1994 bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta kebijaksanaan *link and match* di tingkat pendidikan tinggi agaknya perlu disambut secara positif. Pada kurikulum tersebut terlihat perbedaan yang mencolok dalam hal beban siswa dengan kurikulum sebelumnya. Penekanan yang diberikan kepada tiga kemampuan dasar (*Three R's*) di SD, yang kemudian berlanjut dengan perluasan IPA, Matematika, IPS, Bahasa dan PPKN di SLTP sudah sangat tepat. Pada tingkat SMU, Kurikulum 1994 memperlihatkan usaha penguasaan siswa dalam ilmu, teknologi dan bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) sangat signifikan. Jika hal ini berlanjut maka hasilnya pasti sangat mempengaruhi keberhasilan rencana Ditjen Dikti untuk menyeimbangkan jumlah mahasiswa Teknik dan Mipa dengan mahasiswa ilmu-ilmu sosial pada akhir Pelita VI. Dalam pada itu perlu juga diperhatikan kurikulum pendidikan gurunya sehingga ada keseimbangan. Tanpa mengurangi apa yang telah dilakukan oleh IKIP-IKIP sekarang dengan berbagai penyempurnaan kurikulum pendidikan guru, agaknya tepatlah apa yang dilontarkan oleh Jacqueline Irvin dalam *World Conference ICET* di Lagos, Nigeria pada 1991 yang lalu tentang perlunya kurikulum pendidikan guru menghadapi tahun 2000 didisain secara *responsive* dan *responsible*. *Responsive* dalam arti sensitif terhadap kebutuhan, minat, dan latar belakang kultural siswa, serta *responsible* dalam arti seorang guru kompeten dan *accountable* pada siswa-siswanya (Irvin, 1991:544).

Ketiga, peningkatan kualifikasi dan kualitas tenaga-tenaga kependidikan-nya. Guru memang masih sangat berperan dalam proses belajar-mengajar. Oleh

karena itu penampilannya di muka kelas secara profesional, yang kompeten dan *accountable*, sangat diperlukan. Usaha pemerintah meningkatkan kualifikasi guru-guru SD, SLTP, dan SLTA dengan menerapkan standar ijazah di D_2 , D_3 , dan S_1 sangatlah tepat. Akan tetapi meningkatkan kualitas guru juga terkait dengan penghasilan yang diterimanya setiap bulan. Berdasarkan pengamatan, agaknya di lingkungan negara-negara ASEAN, guru-guru (termasuk dosen) di Indonesia paling rendah penghasilannya dan mungkin paling besar beban tugasnya.

Keempat, perubahan mental masyarakat dari mental agraris tradisional ke mental industri modern memerlukan cara yang tepat dan waktu yang relatif lama. Perubahan mental atau pola pikir tersebut terutama menyangkut kesadaran dan kepedulian terhadap kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan ekonomi (uang), kebutuhan sosial atau hubungan antar manusia, kebutuhan psikologis atau pertumbuhan, dan kebutuhan spiritual atau kontribusi. Kebutuhan ekonomi atau uang adalah bagaimana mereka acuh terhadap bentuk kompensasi moneter, insentif-insentif keuangan. Kebutuhan sosial atau keterhubungan antar manusia termasuk pentingnya interaksi yang sehat, sistem komunikasi efektif, perasaan kebersamaan dan kesetiakawanan. Kebutuhan psikologis mencakup bagaimana mengembangkan kematangan emosi yang stabil. Sementara itu kebutuhan spiritual dapat memantapkan pengembangan motivasi yang efektif yang bermuara pada kokohnya pengambilan keputusan seseorang (*reaffirmation*), kenyamanan (*satisfaction*), dan percaya diri (*confidence*). Semua upaya perubahan mental ini seyogyanya berangkat dari setiap keluarga. Keluarga yang terdiri dari individu-individu memang sangat tepat untuk pendidikan peran dan tanggung jawab. Individu-individu tersebut merasa pentingnya keterikatan bersama dalam suasana budaya keluarga untuk mengembangkan perhatian-perhatian dan kekuatan-kekuatannya.

Kelima, pengimplementasian berbagai kebijaksanaan atau aturan-aturan secara konsisten dan tidak berstandar ganda. Disiplin nasional yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang lalu merupakan momentum yang tepat dalam usaha memantapkan kebijaksanaan atau aturan-aturan secara konsisten dan tidak berstandar ganda. Apabila setiap pengambil keputusan, betapapun tingkatnya, melaksanakan prinsip-prinsip ini disertai contoh-contoh keteladanan, akan sangat besar pengaruhnya dalam upaya mencapai masyarakat modern yang *tata tenteram karta raharja*.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat industri yang sudah diambang pintu memerlukan pendidikan sebagai alat transformasi. Pendidikan sebagai alat transformasi memerlukan strategi yang tepat dalam pelaksanaan. Strategi peningkatan mutu pendidikan dalam mempersiapkan masyarakat tersebut di atas agaknya dapat dijadikan alternatif, yakni penguatan dan pemberdayaan lembaga pendidikan, pembenahan kurikulum dan GBPP, peningkatan kualifikasi dan kualitas tenaga kependidikan, perubahan mental masyarakat ke arah masyarakat industri, serta pengimplementasian berbagai kebijakan dan aturan secara konsisten dan tidak berstandar ganda. Sebagian besar strategi itu telah mulai berjalan. Namun tetap diperlukan penguatan atau *reinforcement* dalam pelaksanaannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhabshi, Datuk Syed Othman. 1993. Mental change to cope 2020. *Jurnal IKIM* No. 1, Desember 1993.
- BP7 Pusat. 1993. *Bahan Penataran, Buku III: Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)*. Jakarta: BP7 Pusat.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1987. *Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Djojonegoro, Wardiman. 1995. Transformasi dunia pendidikan dalam kerangka pengembangan sumberdaya manusia. Sumbangsaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada *SILAKNAS ICM* di Jakarta, 6—8 Januari 1995.
- Hornby, A.S. 1957. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press.
- Irvin, Jacquiline. 1991. Teacher education for the year 2000. *ICET International Year Books 1991*, hal. 544.
- Kaufman, Roger F. 1972. *Educational System Planning*. New York: US International University Press.
- Parawansa, Paturungi, dan Rahamma, Tawany. 1989. Sistem pendidikan nasional sebagai ukuran kualitas manusia Indonesia yang kondusif untuk kondisi tinggal landas. Makalah dalam *Seminar Pendidikan Nasional*, Ujung Pandang, 19 Mei 1989.